



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jend. Ahmad Yani kavling 58 (bypass) Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website: <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>

Jakarta, 14 Agustus 2023

Nomor : 553/DJU.2/PS.00/VIII/2023
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pemanggilan Kegiatan Bimbingan Teknis
Penanganan Perkara Berbasis Keadilan
Restoratif Lingkungan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2023

Yth. : Hakim Tinggi, Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Pontianak, Jaksa dan Polisi wilayah Pontianak yang namanya
tersebut dalam lampiran ini.

Sehubungan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan
Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, dimohon Saudara untuk mengikuti kegiatan
tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran
2023 akan dilaksanakan
pada tanggal **23 Agustus s.d 25 Agustus 2023**.
 - a. **Tempat** : **Hotel Golden Tulip Pontianak,**
Jl Tengku Umar No 39 Pontianak.
 - b. **Waktu**
 - **Check in** : Rabu, Pukul 14.00 WIB s.d 17.00 WIB
 - **Pembukaan** : Rabu, Pukul 19.30 WIB s.d Selesai
 - **Penutupan** : Jumat, Pukul 10.00 WIB s.d Selesai

Pakaian: Pakaian Kemeja Batik Lengan Panjang.

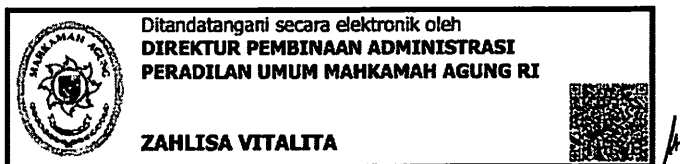
2. **Wajib Menyerahkan:**

- **Tiket Pesawat ekonomi** dan **boarding pass pergi – pulang** (PP) **YANG SAH** dari
Tempat tugas/kedudukan ke tempat penyelenggaraan dan kembali ketempat
kedudukan semula, bagi peserta yang menggunakan transportasi udara yang
disertai **nominal harga**.
- **Tiket bus** bagi peserta yang menggunakan transportasi bus harus disertai **nominal
harga tiket**.
- **Bagi peserta yang menggunakan kendaraan pribadi** diharap melampirkan **Bon
Pengisian BBM**.
- **Surat Keterangan** yang menyatakan dibebaskan dari tugas sehari-hari selama
mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan
Restoratif Lingkungan Peradilan Umum;

3. **Konfirmasi kehadiran dan registrasi** peserta paling lambat tanggal 18 Agustus 2023 dengan melakukan registrasi melalui : **bit.ly/BimtekRJPontianak** Hal-hal lainnya yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – Bypass Cempaka Putih Timur – Jakarta Pusat Telp (021) 29079176 pswt 1505.
Contact Person : 085782479899 (Tietie), 0818-898-850 (Ibu Vina), 0858-9484-8863 (Fauzan), Email: **pengembanganbadilum@gmail.com**

Atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Plt. Direktur
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR : 1706/DJU/SK/PP.01.3/8/2023

TENTANG

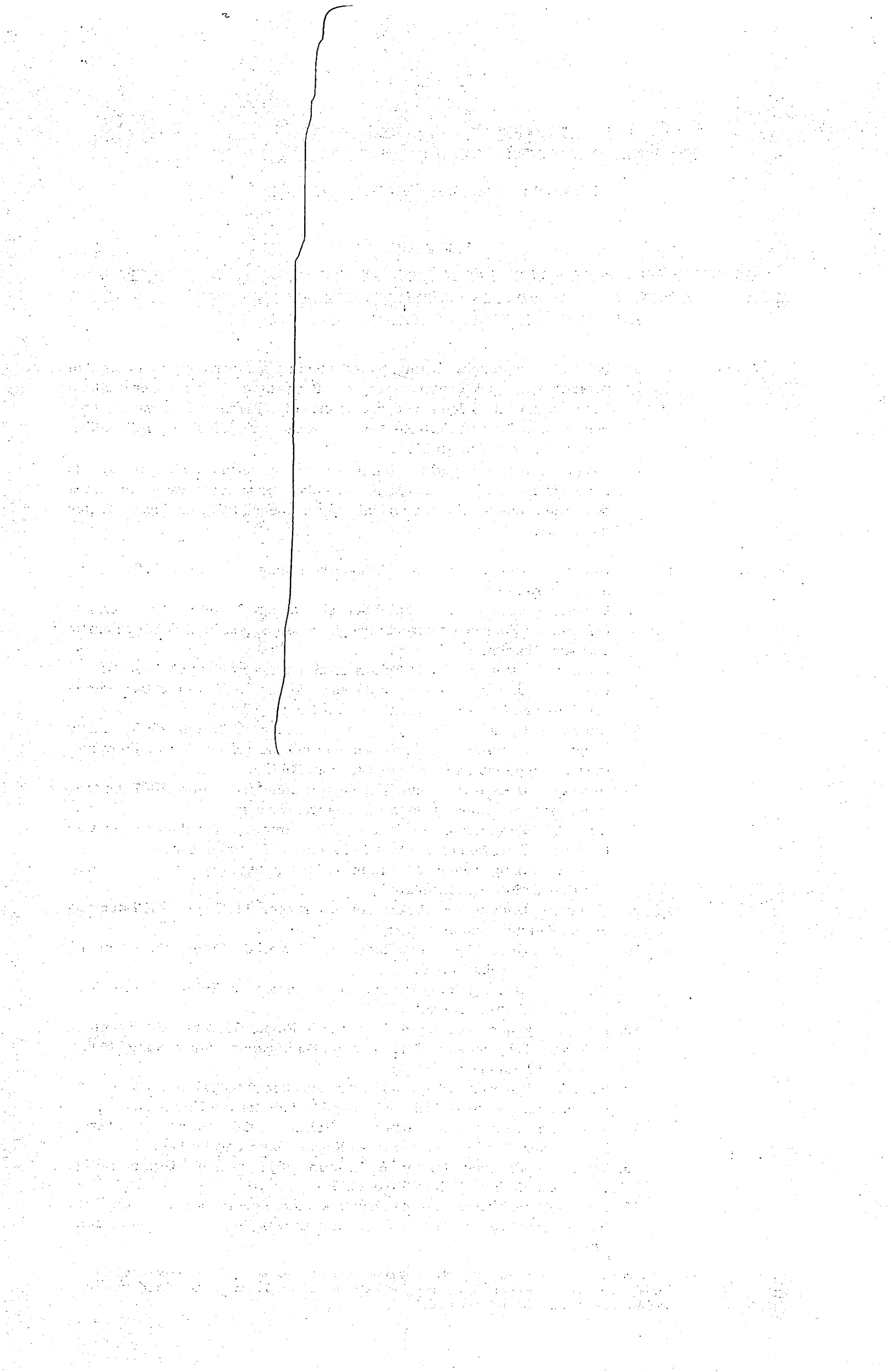
**PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan pelaksanaan tugas Pengadilan serta mewujudkan kemampuan di bidang yudisial maka diperlukan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk itu perlu menunjuk para peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif yang namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

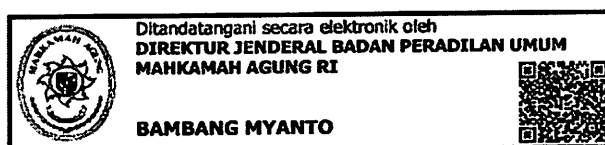


17. Surat Edaran Bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia, dan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08HM.03.02 tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
18. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Nomor 170/SEK/SK/III/2018;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2023 tanggal 30 November 2022;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.
- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai **tanggal 23 Agustus s.d. 25 Agustus 2023**.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2023 tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 08 Agustus 2023



KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
5. Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR : 1706/DJU/SK/PP.01.3/8/2023

TANGGAL : 08 Agustus 2023

DAFTAR PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM



NO.	NAMA	GOL/ RG	JABATAN	L/P	SATKER
1	2	3	4	5	6
1	BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H. NIP. 19631205 198803 1 004	IV/e	HAKIM	L	PT PONTIANAK
2	EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. NIP. 19660909 198702 1 001	IV/e	HAKIM	L	PT PONTIANAK
3	RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H. NIP. 19620905 198612 2 001	IV/e	HAKIM	P	PT PONTIANAK
4	HARI TRI HADIYANTO, S.H.,M.H. NIP. 19601005 198803 1 008	IV/e	HAKIM	L	PT PONTIANAK
5	LUTFI, S.H. NIP. 19600208 198003 1 002	IV/e	HAKIM	L	PT PONTIANAK
6	AGUS WIDODO, S.H., M.Hum. NIP. 19620818 199212 1 001	IV/d	HAKIM	L	PT PONTIANAK
7	ERWIN DJONG, S.H., M.H. NIP. 19620107 199212 1 001	IV/d	HAKIM	L	PT PONTIANAK
8	PRANSIS SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19630224 199212 1 001	IV/d	HAKIM	L	PT PONTIANAK
9	AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. NIP. 19711101 199303 1 002	IV/c	KETUA	L	PN PONTIANAK
10	TIWIK, S.H.,M.Hum. NIP. 19710728 199403 2 002	IV/b	KETUA	L	PN SINGKAWANG
11	MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H. NIP. 19780312 200212 1 002	IV/b	KETUA	L	PN SINTANG
12	SULISTYO MUHAMAD DWI PUTRO, S.H.,M.H. NIP. 19790209 200112 1 002	IV/b	KETUA	L	PN SAMBAS
13	INTAN PANJI NASARANI, S.H., M.H. NIP. 19780416 200212 1 007	IV/b	KETUA	L	PN NGABANG
14	HAKLAINUL DUNGGIO, S.H.,M.H. NIP. 19790102 200312 1 001	IV/a	KETUA	L	PN SANGGAU
15	AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H. NIP. 19790120 200312 1 002	IV/a	KETUA	L	PN PUTUSSIBAU

16	IMELDA, S.H. NIP. 19800621 200312 2 001	IV/a	KETUA	P	PN MEMPAWAH
17	EGA SHAKTIANA, S.H., M.H. NIP. 19771001 200312 1 001	IV/a	KETUA	L	PN KETAPANG
18	OLOAN EXODUS HUTABARAT, S.H., M.H. NIP. 19820105 200312 1 001	IV/a	KETUA	L	PN BENGKAYANG
19	TRI RETNANINGSIH, S.H. NIP. 19740902 199903 2 002	IV/c	HAKIM	P	PN PONTIANAK
20	YAMTI AGUSTINA, S.H. NIP. 19760829 200112 2 002	IV/b	HAKIM	P	PN PONTIANAK
21	WURYANTI, S.H., M.H. NIP. 19760628 200212 2 002	IV/b	HAKIM	P	PN PONTIANAK
22	JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M. NIP. 19720529 200003 1 003	IV/b	HAKIM	L	PN PONTIANAK
23	DEWI APRIYANTI, SH., M.H NIP. 19780411 200212 2 002	IV/b	HAKIM	P	PN PONTIANAK
24	KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H. NIP. 19770602 200212 1 007	IV/b	HAKIM	L	PN PONTIANAK
25	RETNO LASTIANI, S.H., M.H. NIP. 19780308 200112 2 002	IV/b	HAKIM	P	PN PONTIANAK
26	RINI MASYITHAH, SH, MKn NIP. 19800620 200704 2 001	IV/a	HAKIM	P	PN SINGKAWANG
27	JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.,M.H. NIP. 19820424 200704 1 001	IV/a	HAKIM	L	PN SINGKAWANG
28	ROBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H. NIP. 19850509 200805 1 001	III/d	HAKIM	L	PN SINGKAWANG
29	LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H. NIP. 19860403 200912 2 006	III/d	HAKIM	P	PN SINGKAWANG
30	YENI ERLITA, S.H. NIP. 19790820 200912 2 003	III/d	HAKIM	P	PN MEMPAWAH
31	MUHAMMAD RIFQI, S.H. NIP. 19940205 201712 1 007	III/b	HAKIM	L	PN SINTANG
32	DIAH PRATIWI, S.H., M.H. NIP. 19870609 201712 2 002	III/b	HAKIM	P	PN SINTANG
33	RISKY EDY NAWAWI, S.H., L.L.M. NIP. 19931018 201712 2 001	III/b	HAKIM	L	PN SANGGAU

34	MUHAMMAD NUR HAFIZH, S.H. NIP. 19940323 201712 1 003	III/b	HAKIM	L	PN SANGGAU
35	BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H. NIP. 19940508 201712 1 006	III/b	HAKIM	L	PN SANGGAU
36	NOVITASARI TRI HARYANTI, S.H., M.H. NIP. 19931118 201712 2 003	III/b	HAKIM	P	PN SANGGAU
37	HANRY ICHFAN ADITYO, S.H., M.Kn NIP. 19930817 201712 1 006	III/b	HAKIM	L	PN SAMBAS
38	MAHARANI WULAN, S.H., M.Kn NIP. 19890718 201712 2 001	III/b	HAKIM	P	PN SAMBAS
39	ELSA RIANI SITORUS, S.H. NIP. 19870228 201712 2 001	III/b	HAKIM	P	PN SAMBAS
40	DIDIK NURSETIAWAN, S.H. NIP. 19941125 201712 1 004	III/b	HAKIM	L	PN PUTUSSIBAU
41	CHRISTA YULIANTA PRABANDANA, S.H., M.H. NIP. 19920703 201712 1 005	III/b	HAKIM	L	PN PUTUSSIBAU
42	RADITYO MUHAMMAD HARSENO, S.H NIP. 19951002 201712 1 003	III/b	HAKIM	L	PN PUTUSSIBAU
43	GILLANG PAMUNGKAS, S.H. NIP. 19901005 201712 1 003	III/b	HAKIM	L	PN NGABANG
44	GIBSON PARSAORAN, S.H., M.H. NIP. 19911104 201712 1 003	III/b	HAKIM	L	PN NGABANG
45	FAHRIZZA BALQISH QUINA, S.H. NIP. 19940712 201712 2 001	III/b	HAKIM	P	PN NGABANG
46	HARIO WIBOWO, S.H.,M.H. NIP. 19950924 201712 1 004	III/b	HAKIM	L	PN NGABANG
47	WIENDA KRESNANTYO, S.H. NIP. 19921104 201712 1 005	III/b	HAKIM	L	PN MEMPAWAH
48	DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H. NIP. 19861231 201712 1 001	III/b	HAKIM	L	PN MEMPAWAH
49	ANDRE BUDIMAN PANJAITAN , S.H. NIP. 19920328 201712 1 001	III/b	HAKIM	L	PN KETAPANG
50	BAGUS RADITYA WIRADANA, S.H. NIP. 19910630 201712 1 004	III/b	HAKIM	L	PN KETAPANG
51	IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H. NIP. 19890326 201712 2 001	III/b	HAKIM	P	PN KETAPANG

52	ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. NIP. 19880311 201712 1 002	III/b	HAKIM	L	PN KETAPANG
53	AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., M.H. NIP. 19910118 201712 1 001	III/b	HAKIM	L	PN KETAPANG
54	DONI AKBAR ALFIANDA, S.H. NIP. 19940516 201712 1 008	III/b	HAKIM	L	PN BENGKAYANG
55	ARIF SETIAWAN, S.H. NIP. 19901103 201712 1 003	III/b	HAKIM	L	PN BENGKAYANG
56	MUHAMMAD LARRY IZMI, S.H., M.H. NIP. 19870326 201712 1 001	III/b	HAKIM	L	PN BENGKAYANG
57	UTIN REZA PUTRI, SH., MH NIP. 19751030 200112 2 001	IV/b	PANITERA	P	PN PONTIANAK
58	AGUS ERWIN HARAHAP, SH.,MH NIP. 19750801 200112 1 003	IV/a	PANITERA	L	PN SINGKAWANG
59	PRAMULIA, SH NIP. 19640726 198603 1 005	III/d	PANITERA	L	PN MEMPAWAH
60	ANUNG HANDONO, S.H. NIP. 19730322 199303 1 003	III/d	PANITERA	L	PN KETAPANG
61	DIAH PURWADANI, SH NIP. 19840515 200704 2 001	III/d	PANITERA	P	PN SANGGAU
62	RUSWANTO, SH NIP. 19691030 199303 1 001	III/d	PANITERA	L	PN SAMBAS
63	EDY SWADESI, SH NIP. 19700717 199303 1 002	III/d	PANITERA	L	PN SINTANG
64	EKA FITRIASARI, SH NIP. 19820411 200904 2 006	III/d	PANITERA	P	PN NGABANG
65	SUPARMAN, S.IP NIP. 19710530 199303 1 005	III/d	PANITERA	L	PN PUTUSSIBAU
66	OJAK SAGALA, S.H. NIP. 19800921 200912 1 003	III/d	PANITERA	L	PN BENGKAYANG
67					KEJARI PONTIANAK
68					KEJARI PONTIANAK

69					POLRESTA PONTIANAK
70					POLRESTA PONTIANAK

 Ditandatangani secara elektronik oleh
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI**
BAMBANG MYANTO 

JADWAL ACARA
BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF

Hotel Golden Tulip Pontianak, Jl Teuku Umar No. 39 Pontianak

NO.	HARI / TANGGAL WAKTU	ACARA	KETERANGAN
1.	Rabu, 23 Agustus 2023		
	14.00 – 17.00	Check in dan Registrasi	Penyelenggara/Panitia
	17.00 - 19.00	ISHOMA/Makan Malam	
	19.30 - selesai	Acara Pembukaan : a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Hymne MA c. Pembacaan Do'a d. Laporan penyelenggara e. Sambutan WKPT Pontianak f. Sambutan, Pembukaan dan Pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Pre test <i>Coffee Break</i>	Pembawa Acara Seluruh Hadirin Peserta Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Perkembangan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam penegakan hukum di Indonesia
2.	Kamis, 24 Agustus 2023		
	06.00 – 07.30	Sarapan	Penyelenggara
	07.30 – 07.45	Presensi peserta	Penyelenggara/Panitia
	08.00 – 10.00	Rancangan Perma <i>Restorative Justice</i> Mahkamah Agung RI	- Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
	10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>	
	10.15 – 12.00	Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum.	- Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.
	12.00 – 13.15	ISHOMA/MAKAN SIANG	
	13.15 – 15.15	Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada tahap penuntutan menurut Penuntut Umum	- Kejaksaan Agung RI
	15.15 – 15.45	<i>Coffee Break</i>	
	15.45 – 17.45	Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam tahap penyelidikan menurut perspektif Kepolisian.	- Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
	17.45 – 19.00	ISHOMA/MAKAN MALAM	
	19.00 – 21.00	Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum.	- Ketua PT Banjarmasin

	21.00 - selesai	<i>Coffee Break</i>	
--	-----------------	---------------------	--

3.	Jumat, 25 Agustus 2023		
	06.00 – 07.30	Sarapan	
	07.30 – 07.45	Presensi peserta	Penyelenggara/Panitia
	08.00 - 09.30	Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum.	- Ketua PT Banjarmasin
	09.30 – 10.00	Post test	Pembawa Acara
	10.00 - selesai	Acara Penutupan: a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri c. Penutupan d. Doa e. Pembagian Sertifikat	Peserta Panitia

Pakaian : Batik/Motif Tradisional Lengan Panjang

HARAP DI ISI DAN DISERAHKAN
KEPADA PANITIA PADA SAAT
REGISTRASI DAN CHECK IN

BIODATA PESERTA

Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
Hotel Hotel Golden Tulip Pontianak, Jl Tengku Umar No 39 Pontianak.

NAMA LENGKAP	:(nama dan gelar tulis yang benar)						
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:, <table border="1"><tr><td>Tanggal</td><td>Bulan</td><td>Tahun</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	Tanggal	Bulan	Tahun	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tanggal	Bulan	Tahun						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN						
PENDIDIKAN TERAKHIR	:						
JABATAN	:						
PANGKAT-GOL/RUANG	:						
NIP	:						
EMAIL / GMAIL	:						
NO HANDPHONE	:						
SATUAN KERJA	:	Pengadilan Tinggi / Negeri						
ALAMAT KANTOR	: TELEPON: FAX:						

Pontianak, Agustus 2023
Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara
Berbasis Keadilan Restoratif

(.....)